

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Politik dalam benak masyarakat Indonesia masih merupakan kegiatan yang banyak diikuti oleh kaum laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam hal berpolitik masih dianggap sebagai pelengkap. Perjalanan untuk menggapai pengakuan agar keberadaannya di masyarakat dapat diterima secara proposional penuh dengan hambatan. Hal yang menjadi penghambat dalam ruang gerak publik adalah adanya mitos sosial dan pemahaman doktrin teologis yang diyakini kebenarannya oleh sebagian masyarakat (Sugiarti, dkk., 2003:3).

Kedudukan laki-laki dan perempuan seharusnya bisa disejajarkan disetiap aspek kehidupan. Hal ini didukung oleh undang-undang yang menempatkan kedudukan mereka sejajar dengan laki-laki dalam kegiatan publik. Peraturan yang mengatur tentang hak-hak politik perempuan telah dinyatakan dalam pasal 7 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Sihite, 2007:157), dimana hak-hak politik perempuan antara lain:

- a. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih.
- b. Berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya dan memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi di semua tingkatan pemerintah.
- c. Berpartisipasi dalam perkumpulan organisasi-organisasi non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik Negara.

Melalui pasal di atas telah jelas bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam kegiatan publik, salah satunya berpartisipasi dalam politik. Kepedulian pemerintah dalam hal keterlibatan perempuan memasuki ranah politik adalah dikeluarkannya ketetapan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum melalui UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keterwakilan perempuan dalam politik ditentukan dalam Pasal 55 yang menyatakan: *“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”*

Dari kebijakan undang-undang tersebut dapat menjadi titik awal perjuangan dalam meraih kesetaraan di bidang politik. Dengan adanya kuota 30% dalam parlemen dianggap penting karena merupakan aksi mendukung (*affirmative action*) bagi perempuan untuk memasuki ranah politik. Maksud dari hal tersebut adalah dengan harapan memberikan kesempatan yang luas untuk maju ke ruang publik dan menempati posisi strategis pengambilan keputusan guna untuk mewakili kepentingan mereka. Serta dalam hal menciptakan keadilan dan bersih dari korupsi, dalam rangka menciptakan dunia yang baru (dunia bebas diskriminasi).

Keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan politik di Indonesia masih terbilang minim walau sudah memiliki dasar undang-undang. Diambil dari Jurnal Perempuan dan Politik oleh Angelina Sondakh diperoleh jumlah perempuan dalam yang duduk di parlemen. Tahun 1999-2004 hanya 9% dan

tahun 2004 -2009 hanya ada 11,4% atau sekitar 63 perempuan saja yang menjadi anggota parlemen (DPR) periode 2004-2009.

(<http://www.angelinasondakh.com/nsroom/artikel/perempuan-politik.pdf>, diakses pada 26 Maret 2013,19.53 WIB)

Hal ini berhubungan dengan masalah kesetaraan gender dalam politik. Terutama kedudukan dan peran perempuan dalam politik harus tetap menjadi agenda utama para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Secara tegas, *affirmative action* harus terus dikampanyekan dan didukung setiap anggota parlemen (Jurnal Perempuan Edisi 35, 2004:31-35).

Walau pada kenyataannya masih banyak partai politik yang hanya berusaha memenuhi kuota untuk para calon legeslatif (caleg) perempuan, tetapi kurang memperhatikan kualitas dan daya tawar mereka di masyarakat. Fenomena yang menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah partai politik yang mengusung tokoh populer terutama artis sebagai calon legeslatifnya. Seperti Angel Lelga dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jane Shalimar dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Bella Saphira dari Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Vena Melinda dari Partai Demokrat dan Krisdayanti dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

Banyak perempuan dari kalangan artis baik yang senior maupun yang baru terdaftar sebagai calon legeslatif pemilihan umum 2014. Akibatnya muncul kekhawatiran apakah calon legeslatif yang diajukan oleh partai-partai politik itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Partisipasi penuh perempuan merupakan prinsip dasar untuk program pembangunan apapun. Adanya perbedaan biologis antara laki-laki-perempuan mempengaruhi kehidupan masing-masing dalam hal sosial, budaya, ekonomi dan bahkan politik. Kurang optimalnya kesetaraan dan keadilan gender membuat partisipasi perempuan dalam dunia politik menjadi minim. Perempuan hampir dianggap tidak ada yang secara dominan memegang tampuk kekuasaan selama dekade Indonesia, baik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perempuan Indonesia seakan enggan merebut jabatan-jabatan politik yang biasanya diduduki oleh laki-laki. Kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dalam bidang politik masih menjadi masalah utama dalam partisipasi politik (Utami, 2001:5)

Memperhatikan data yang ada tersebut, perempuan masih membutuhkan ruang yang luas dalam hal akses politik. Ada tiga hal yang dapat menjelaskan rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, yaitu; *pertama*, sosial kultur, dalam tradisi di Indonesia secara keseluruhan memang masih belum memberikan ruang secara luas dalam bidang politik. Dalam masyarakat telah timbul persepsi dengan dasar-dasar patriarkhi bahwa laki-laki adalah pemimpin. *Kedua*; persoalan struktur, dalam struktur politik Indonesia masih memberikan batas atau enggan memberikan kesempatan pada perempuan untuk berkarir. Mereka hanya dianggap sebagai pelengkap kelas dua. *Ketiga*; soal agama dan tafsir agama, dalam berbagai teks-teks agama, perempuan tidak ditempatkan setara dengan laki-laki. Dengan kata lain jika kepemimpinan

diberikan kepada perempuan maka sebuah negara memiliki kehancurannya (Setyaningrum, dkk., 2007:xiii-xiv).

Partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai komunikasi politik memiliki dua aktivitas, yaitu aktivitas penggabungan kepentingan (*interest aggreation*) dan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Penggabungan kepentingan pada intinya adalah penampungan pendapat, aspirasi, dan kepentingan seseorang atau kelompok yang tergabung dalam sebagai anggota partai politik. Pendapat-pendapat yang ditampung tersebut kemudian diartikulasikan menjadi nilai-nilai moral yang dianut oleh partai politik tersebut (Shafiyyah&Soeripno, 2003:64).

Pada penelitian ini peneliti membandingkan antara partai nasionalis dan partai berbasis agama. Partai nasionalis senantiasa dilekatkan kepada sosok Soekarno, meskipun tidak demikian. Keberadaan partai nasionalis ini seringkali dipertentangkan dengan partai-partai Islam. Bila partai-partai Islam berkecenderungan meletakkan dasar agama dalam argumen bernegara, sebaliknya partai nasionalis justru, dalam batas-batas tertentu, berusaha mensekulerkan Negara. Diantara dua kekuatan ini seringkali berseberangan akan sikap politik (Pamungkas, 2001:119).

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merupakan salah satu partai nasionalis di Indonesia. Kehidupan politik PDI Perjuangan di Kota Surakarta ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Kota yang dijuluki *Kandang Banteng* ini memang merupakan basis partai ini. Pada tahun 2009 PDI Perjuangan menempatkan kader terbaiknya sebanyak 15 orang menduduki kursi DPRD

Surakarta. Namun dari jumlah sebanyak itu PDI Perjuangan hanya memiliki 4 orang kader perempuan menduduki kursi legislatif. Berbeda dari kondisi PKS yang belum memiliki kader perempuan yang menduduki kursi legislatif DPRD Surakarta. Sebanyak 4 Kader terbaik PKS yang berhasil menjadi anggota legeslatif semuanya adalah laki-laki.

Dengan peraturan pemerintah yang menetapkan 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik, PDI Perjuangan dan PKS Kota Surakarta membuktikan dengan pemenuhan kuota 30%. Kedua partai ini mendaftarkan 45 orang caleg partainya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surakarta. Tidak hanya pemenuhan kuota 30% dalam partainya, partisipasi politik perempuan dalam PKS juga telah diwadahi sebuah organisasi yang disebut sebagai Pos Wanita Keadilan (PWK) yang bergerak dibawah binaan PKS dan bidang perempuan. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi PKS karena belum banyak partai politik di Indonesia yang menyentuh secara khusus permasalahan-permasalahan perempuan dalam politik.

**Tabel 1. Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Surakarta  
DPD PKS dan DPC PDI Perjuangan Surakarta Pemilihan Umum 2014**

No.	Daerah Pemilihan	DPD PKS		DPC PDIP	
		P	L	P	L
1.	Daerah Pemilihan Surakarta 1	3	5	3	5
2.	Daerah Pemilihan Surakarta 2	3	5	3	5
3.	Daerah Pemilihan Surakarta 3	3	4	3	4
4.	Daerah Pemilihan Surakarta 4	5	6	4	7
5.	Daerah Pemilihan Surakarta 5	4	7	4	7
<b>Total</b>		18	27	17	28
		45		45	

Sumber : Jawa Pos, Senin 17 Juni 2013

Penelitian Ahmad Dhafir (2012) tentang Rekrutmen Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surakarta mengungkapkan bahwa realitas rekrutmen perempuan di PDIP Surakarta pada kondisinya sebenarnya tidak mengalami perbedaan dengan laki-laki. Rekrutmen disamakan dan tidak ada diskriminasi. Namun kemudian dalam prosesnya banyak perempuan yang mulai terseleksi dengan sendirinya. Hal ini disebabkan karena kondisi perempuan itu sendiri yang mempunyai beban ganda, di domestik dalam rumah tangga maupun di ruang publik ketika perempuan aktif di dalam partai politik.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena membandingkan dua partai besar untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tiap partai untuk menjaring atau merekrut perempuan untuk turut serta berpartisipasi politik. PDI Perjuangan yang merupakan partai nasionalis pasti memiliki strategi berbeda dari PKS yang merupakan partai berbasis agama (Partai Islam) dalam hal menjalankan komunikasi politik. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: “Peran Perempuan dalam Partai Politik (Analisis Komparatif Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta dalam Rekrutmen Perempuan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka terbentuk perumusan masalah, yaitu, bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan dalam rekrutmen perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan komparatif (perbandingan) strategi komunikasi politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta dalam rekrutmen perempuan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara teoritis**

Dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan serta informasi bagi dunia pendidikan yang ada saat ini khususnya bidang ilmu komunikasi.

### **2. Secara praktis**

Hasil penelitian tentang strategi komunikasi politik ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi perempuan yang aktif dalam politik dan pengambilan kebijakan.



## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Komunikasi

Pentingnya komunikasi bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan dan politik sudah disadari oleh banyak cendekiawan sejak ratusan tahun sebelum masehi. Harold D. Lasswell menyatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan, *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*. Unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu komunikator (*communicator, source, sender*), pesan (*message*), media (*channel*), komunikan (*communicant, receiver, recipient*) dan efek (*effect, impact, influence*) (Effendy, 1992:10).

Bentuk-bentuk komunikasi mempunyai berbagai macam bentuk yang semuanya bergantung pada segi kita memandangnya (Nurjaman&Umam, 2012:41), yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi penyampaian pesannya, komunikasi dapat dilakukan secara lisan dan secara tertulis, atau secara elektronik melalui radio, televisi, telepon, internet dan sebagainya.
- b. Dari segi kemasan pesan, komunikasi dapat dilakukan secara verbal (dengan berbicara) atau dengan nonverbal (dengan bahasa isyarat).
- c. Dari segi kemasan keresmian perilaku komunikasi, saluran komunikasi yang digunakan, dan bentuk kemasan pesan, komunikasi dapat dikategorikan sebagai bentuk komunikasi formal dan nonformal.

d. Dari segi pasangan komunikasi, komunikasi dapat dilihat sebagai:

- d.1. Komunikasi intrapersonal (*infra personal communication*), yaitu proses komunikasi dalam diri komunikator: pengirim dan pesannya adalah diri sendiri (manusia sebagai makhluk rohani).
- d.2. Komunikasi interpersonal (*inter personal communication*), yaitu interaksi tatap muka antara dua orang atau lebih. Pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung, sedangkan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula (manusia sebagai makhluk sosial).

Sebuah komunikasi harus dilakukan dengan efektif agar pesan yang dimaksudkan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan benar dan sesuai sasaran. Efektif disini berarti komunikasi tersebut merupakan penerimaan pesan oleh komunikan sesuai dengan pesan yang dikirim oleh komunikator, kemudian komunikan memberikan respon yang positif sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, komunikasi efektif terjadi apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai harapan kedua pelaku komunikasi tersebut.

Aspek-aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi efektif ,yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan (*clarity*) : bahasa ataupun informasi yang disampaikan harus jelas. Jangan menggunakan ucapan-ucapan yang tidak dimengerti sama sekali oleh penerima pesannya.

- b. Ketepatan (*accuracy*) : bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat alias tepat. Benar berarti sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Bisa saja informasi yang kita sampaikan belum tentu kebenarannya, tetapi apa yang kita sampaikan benar-benar kita ketahui. Inilah maksud akurasi disini.
- c. Konteks (*contex*) : bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan tempat komunikasi itu terjadi. Bisa saja kita menggunakan bahasa dan informasi yang yang jelas dan tepat namun karena konteks tidak tepat maka dapat menimbulkan reaksi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- d. Alur (*flow*) : keruntutan alur bahasa dan informasi sangat berarti dalam menjalin komunikasi efektif.
- e. Budaya (*culture*) : aspek ini tidak menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tatakrama dan etika. Jadi dalam berkomunikasi kita perlu memberikan perhatian pada budaya yang ada ditempat itu.

Fungsi komunikasi bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan. Kata-kata hanyalah sebagian kecil bentuk ungkapan atau ekspresi manusia. Peran komunikasi tidak hanya proses penyampaian pesan namun juga proses membangun hubungan antar pelaku komunikasi.

## **2. Komunikasi Politik**

Komunikasi merupakan awal dari segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam bidang politik kita juga telah

mempelajari ilmu politik yang dikenal sebagai komunikasi politik. Komunikasi politik sudah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi. A.Muis (1990) menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik menunjukkan pesan pada pesan sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik (Ardial, 2010:28).

Lingkup dari komunikasi politik tidak hanya membahas bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk mencapai kekuasaan dan tujuan secara internal tapi juga untuk mengetahui bagaimana sistem politik dipertahankan dan dialihgenerasikan. Dengan kata lain komunikasi digunakan sebagai upaya untuk mempengaruhi negara lain untuk mencapai tujuan politik dalam negeri dan mewujudkan hubungan yang menguntungkan di antara dua belah pihak yang mengadakan komunikasi.

Lord Windlesham (Effendy, 2004:158) dalam karyanya *What Is Political Communication* mendefinisikan komunikasi politik sebagai:

*Political communication is the deliberate passing of a political message by a sender to a receiver with the intention of making the receiver behave in a way that might not otherwise have done.* (Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu).

Muis (2000:xiv) menyatakan pengertian dari komunikasi politik adalah proses komunikasi yang bermuatan penggunaan kecerdasan, kepintaran, kecerdikan, bahkan kelicikan (*sagacity, expediency, craftiness, judiciousness, schemingness*) dengan tujuan mengatur dan menguasai masyarakat dan negara. Pengertian ini berarti bahwa lembaga legislatif, hukum, politik, ekonomi dan

masyarakat menggunakan berbagai macam komunikasi untuk mengontrol, menguasai dan mengatur masyarakat serta negara.

Untuk menjadikan komunikasi politik yang efektif maka kita harus membuat sistem politik menjadi hidup dan dinamis. Komunikasi politik merupakan alat sambung dari semua sistem politik yang ada baik dari masa kini dengan masa lampau. Sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Apabila komunikasi politik yang dilakukan tersebut berjalan lancar, wajar dan dan sehat maka sistem politik akan memiliki tingkat responsif yang tinggi dari masyarakatnya (Alfian, 1991:2).

Indikasi untuk menjelaskan fungsi komunikasi politik adalah dapat dilihat dari beberapa hal berikut (Putra, 2012:47):

- a. Komunikasi politik adalah suatu strategi untuk mendapatkan dukungan dan pemenuhan terhadap kebutuhan dalam sistem politik, dengan asumsi demikian dapat dicontohkan dengan pemenuhan kepentingan, mengambil keuntungan melalui kebijakan dan strategi politik.
- b. Komunikasi politik sebagai alat penghubung antara rakyat dan pemerintah, baik dalam hal mobilisasi sosial untuk implementasi hubungan, memperoleh dukungan, kepatuhan, dan juga integrasi politik.
- c. Komunikasi politik memiliki peran sebagai pemberi ancaman untuk memperoleh loyalitas (kepatuhan) sebelum alat paksa digunakan. Secara sederhana, komunikasi sebagai pintu perundingan awal dalam menentukan atau pengambilan kebijakan.

- d. Komunikasi politik memberikan nilai etika terhadap pergerakan politik sehingga mampu menguasai homogenitas yang relatif tinggi.
- e. Komunikasi politik juga juga mampu menjadi pengontrol sosial yang memiliki idealisasi sosial dan keseimbangan politik.

Dari kelima uraian di atas, dapat dipahami secara garis besar komunikasi politik adalah bagian penting sebagai jalan mencapai keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam wilayah kehidupan bernegara. Selain itu ada dua hal penting yang menjadi fungsi komunikasi politik, kedua hal tersebut menjadi penyeimbang berjalannya perpolitikan pemerintah.

Pertama, fungsi komunikasi politik pada struktur pemerintahan (suprastruktur politik) atau biasanya disebut dengan istilah *governmental political sphere*. Didalamnya berisikan informasi yang menyangkut berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasionalis untuk mencapai tujuan Negara yang lebih luas.

Kedua, fungsi komunikasi politik pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) atau biasa disebut dengan istilah *the public political sphere* yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, di kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.

### 3. Partisipasi Politik

Banyak ahli politik di dunia yang mencoba mendefinisikan maksud dari partisipasi politik dengan ciri-ciri dan landasan yang dianggap sebagai sebuah partisipasi politik. Budi Asyhari-Afwan (Setyaningrum,dkk., 2007:170) mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut:

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contracting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (Budiardjo, 1982:2) mendefinisikan partisipasi politik sebagai:

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influenced govermental decision making. Participations may be individual or collective, organized or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kegiatan partisipasi politik dilakukan bersama-sama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Selain itu kegiatan tersebut juga mendasari untuk menentukan orang-orang untuk menjadi pemegang tampuk kepemimpinan di masa yang akan datang. Oleh karena itu

partisipasi politik merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang dianggap sah rakyat.

Herbert McClosky (Budiardjo, 2010:367) memberikan pengertian partisipasi politik sebagai berikut:

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. *(The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy).*

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990:16-20) mengelompokkannya sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemilihan

Kegiatan ini mencakup suara akan tetapi juga sumbangan-sumbangan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan untuk seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Sebagai intinya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk perubahan (siklus) pemilihan dan pemungutan suara.

b. *Lobbying*

Mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.



c. Kegiatan Organisasi

Mencakup partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian memusatkan usaha-usahanya pada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengalihkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam.

d. Mencari Koneksi

Tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

e. Tindak Kekerasan

Merupakan suatu bentuk partisipasi politik dan bentuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai suatu kategori tersendiri: artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

#### **4. Gender dalam Politik**

Gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan antara gender dengan kata seks (jenis kelamin). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis

kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2001:7-8).

Gender menurut *Women's Studies Encyclopedia* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat (Umar, 1999:33).

Partisipasi perempuan dalam politik mencerminkan masih kuatnya ideologi patriarki dimana keikutsertaan perempuan dalam partai politik/keudukan di parlemen, merupakan bagian dari dominasi kekuasaan/jabatan suami atau laki-laki. Stereotipe gender yang dilekatkan pada perempuan mempertegas bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Argumentasi-argumentasi itu menjadi alasan yang signifikan menolak perempuan menduduki jabatan strategis di lembaga politik formal dan kepemimpinan perempuan sulit mendapat pengakuan di arena politik (Sihite, 2007:163).

Dalam mengikuti partisipasi politik perempuan memiliki kendala baik eksternal maupun internal (Utami, 2001:23-24). secara internal dibagi menjadi tiga faktor kendala yaitu:

- a. Kendala berhubungan dengan sikap mental perempuan yang kurang berbuat maksimal untuk masa depannya. Peran perempuan lalu sebagai *second person* baik struktural maupun sosiologis

- b. Posisi marginal. Dimana perempuan tidak pernah terlibat aktif dalam kegiatan politik. Akibatnya perempuan hanya menjadi objek pembangunan.
- c. Lemahnya *budgeting* untuk aktivitas politik. Tidak disadari bahwa dalam urusan aktivitas politik secara riil bisa menguras “dana”.

Secara eksternal, ada tiga faktor yang mempengaruhi aktivitas perempuan dalam politik, yaitu:

- a. Terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- b. Masih terdapatnya kelemahan hubungan kemitraan antara pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan.
- c. Masih rancunya format pemberdayaan perempuan dalam berbagai hal. Dalam hal ini perempuan harus berpacu secara elegan dengan laki-laki yang secara dominan masih minim kesadaran gender.

## 5. Partai Politik

Sarana dalam berpartisipasi dalam dunia politik adalah ikut serta dalam partai politik yang ada. Sigmund Neuman (Budiardjo, 1982:61), memberikan definisi partai politik sebagai:

“Partai Politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.”

Carl J. Friedrich (Budiardjo, 2010:404) menyatakan definisi partai politik sebagai:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil . (*A political, party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

Di negara demokrasi partai relatif menjadi wadah untuk warga negara berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa. Beberapa fungsi partai politik yang di sebutkan oleh Miriam Budiardjo (1982:405-410), yaitu:

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Didalam dunia modern saat ini setiap orang bebas dalam mengutarakan aspirasi dan pendapatnya ke muka umum. Namun aspirasi ataupun pendapat yang tidak ditampung ini akan dapat menghilang tanpa menghasilkan apa-apa. Perlu adanya penggabungan aspirasi yang senada atau sependapat agar dapat diolah menjadi lebih teratur untuk perumusan kepentingan.

Penampungan aspirasi oleh partai politik ini yang menjadi usul untuk kebijakana. Dari usul kebijakan tersebut dimasukan ke dalam program partai untuk disampaikan atau diperjuangkan melalui parlemen pemerintah agar menjadi kebijakan umum (*public policy*).

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik partai adalah upaya dalam penciptaan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Fungsi lain dari sosialisasi politik partai adalah untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Pada fungsi ini dikaitkan erat dengan permasalahan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Tingkatan ini pada partai politik berkepentingan untuk memperluas dan memperbanyak keanggotaannya. Baik dari kalangan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya.

Rekrutmen yang dilakukan ini juga didasari untuk menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*conflict Management*)

Konflik yang timbul akibat dari masyarakat yang bersifat heterogen baik dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama tidak dapat dihindarkan. Di sini peran partai politik untuk membantuk mengatasinya,

meminimalisir sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan. Ringkasnya partai politik menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya.

## 6. Penelitian yang relevan

Penelitian maupun studi yang dilakukan tentang partisipasi perempuan dalam politik banyak menitikberatkan pada faktor-faktor yang menghambat maupun memberikan pengaruh untuk terjun dalam dunia politik.

M. Zainuri (2007) juga melakukan penelitian tentang partisipasi politik perempuan di Kota Kudus. Pada penelitiannya ia mengungkapkan beberapa hal yang masih menjadi hambatan bagi para perempuan yang ada di Kudus untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Hal ini dikarenakan Kudus merupakan kota religius yang masih mengikuti teks-teks kitab salaf (kitab kuning) yang telah menjadi pegangan masyarakat Kudus sejak Sunan Kudus. Masyarakat perempuan Kudus berpartisipasi dalam dunia politik dengan niat untuk menyalurkan bakat berorganisasi yang mereka punya. Perempuan memasuki dunia politik diawali dengan menjadi pengurus *underbow* partai politik atau menjadi organisasi masyarakat yang dianggap menjadi mesin politik partai politik dan diusulkan oleh partai politik untuk melengkapi *affirmative action*.

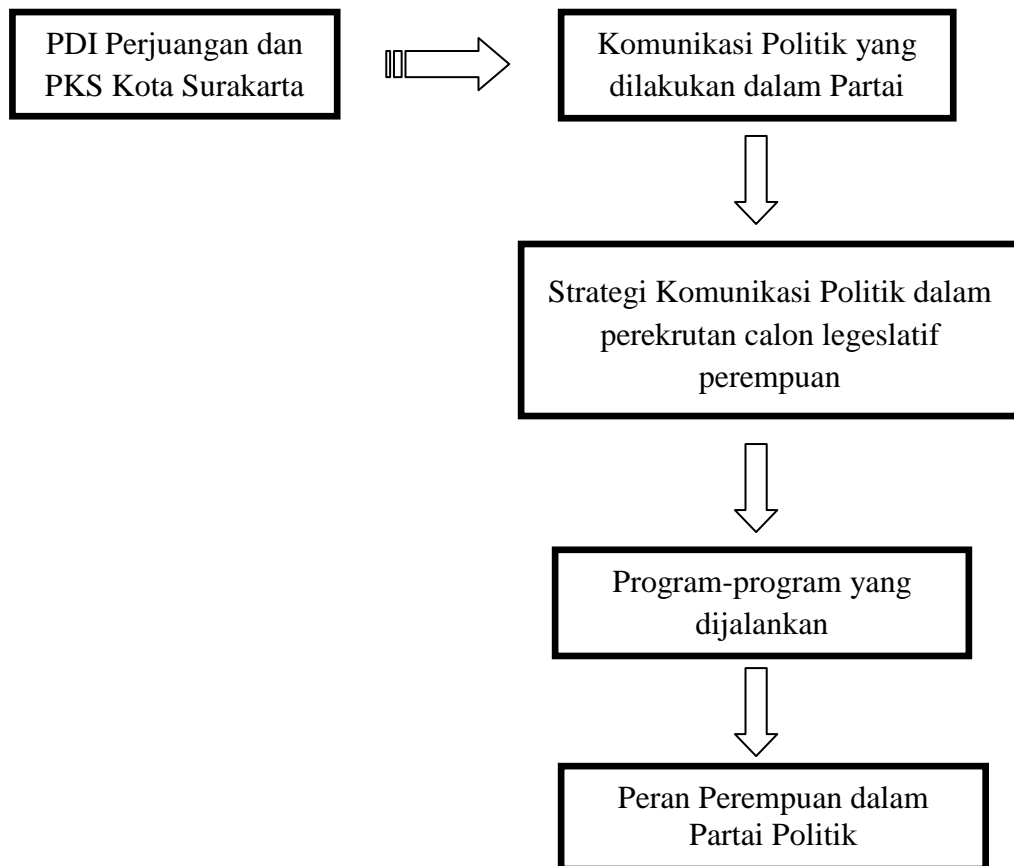
Penelitian yang dilakukan oleh Indah Suryani (2010) tentang partisipasi perempuan dalam komunikasi politik kepada Pengurus di Pos-Wanita Keadilan (Pos-WK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sukoharjo di tahun 2009. Dalam penelitiannya ia menjabarkan berbagai faktor-faktor mempengaruhi partisipasi

perempuan dalam komunikasi politik. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi alasan dan kondisi internal maupun eksternal. Pemberdayaan perempuan Indonesia di semua sektor kehidupan, termasuk didalamnya politik. Peran ganda yang dilakukan perempuan juga mempengaruhi partisipasi politik perempuan, baik dari pemahaman politik, kondisi geografis dan minimnya kesempatan dalam berpolitik. Bentuk-bentuk partisipasi perempuan juga memiliki fungsi bagi kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Perempuan sebagai komunikator politik partai tidak segan menggunakan media komunikasi politik untuk seperti demonstrasi meraih tujuan politik mereka.

Dari penelitian di atas menjadi bukti bahwa kegiatan politik memiliki banyak aspek yang digambarkan sebagai kegiatan komunikasi. Dimana partisipasi perempuan dalam dunia politik memiliki berbagai motivasi dan hambatan yang menyertainya.

## F. Kerangka Pemikiran

Secara singkat kerangka pikir bagi penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut



Gambar.1. Skema Kerangka Pikir

Komunikasi sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal politik. Komunikasi politik yang dijalankan oleh partai politik memungkinkan terorganisirnya kondisi partai baik di pusat hingga ranting partai. Komunikasi politik tidak hanya terjadi secara internal partai, namun juga harus dilakukan secara eksternal.

Sementara untuk menjaga eksistensinya dalam dunia politik. Setiap partai politik ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan memunculkan calon-



calon legeslatif dari partainya. Sehingga diperlukan strategi komunikasi politik untuk merekrut calon-calon tersebut, bukan hanya untuk pemenuhan kuota namun juga mengandalkan kualitas. Strategi yang termasuk juga didalamnya proses perekrutan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan partai politik. Calon yang terpilih benar-benar bisa menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Selain itu untuk mencari massa atau pendukung, partai mengeluarkan program-program yang juga menjadi sebuah bentuk komunikasi kepada masyarakat khususnya perempuan. Komunikasi ini diperlukan agar konstituen dapat lebih mengenal dan mengetahui visi dan misi dari partai yang diikuti. Peran perempuan dalam partai dapat ditunjukkan dengan kontribusi mereka setelah bergabung.

## **G. Metodologi**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif yang didukung oleh data kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) secara mendalam bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam membangun komunikasi politik di DPC PDI Perjuangan dan DPD PKS Kota Surakarta. Penelitian deskriptif timbul karena suatu peristiwa yang menarik perhatian peneliti, tetapi belum ada kerangka teoritis untuk menjelaskannya. Penelitian kualitatif bukan hanya

untuk menjabarkan (analitis), tetapi juga memadukan (sintetis). Bukan saja melakukan klarifikasi tetapi juga organisasi (Rakhmat, 1994:25-26).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi yang dijabarkan oleh Edmund Husserl adalah bahwa disetiap hal, manusia memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap setiap fenomena yang dilaluinya dan pemahaman dan penghayatannya tersebut sangat berpengaruh terhadap perilakunya (Giorgi & Giorgi dalam Hardiansyah, 2010:66).

Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkapkan sedetail mungkin objek yang dikaji dan aspek-aspek lain yang tidak mungkin dihitung dengan matematika. Pendekatan ini membutuhkan konsentrasi lebih dan keterampilan menggali dan mengeksplorasi *central phenomenon* lebih dibandingkan model lainnya. Penggunaan studi ini penting untuk menyerap dan mengungkapkan kembali perasaan dan pemikiran dibalik tindakan politisi, termasuk motif menjadi anggota DPR, karena hal ini dilihat dari keprihatinannya terhadap kepentingan rakyat, individu, kelompok partai, dan sebagainya (Mulyana&Solatun, 2007:33).

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode tersebut berdasarkan pengertian dari John W. Creswell (Herdiansyah, 2010:8) yang mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai:

*Qualitative research in an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of informants, and conducts the study in a*

*natural setting*. (Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti).

Sesuai tujuan dari penelitian sendiri, yaitu mengetahui cara pandang, cara hidup, selera, ungkapan emosi dan keyakinan, serta analisis fenomena yang ada di masyarakat sekitar peneliti. Moleong memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda dengan di atas, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010:9).

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan untuk dilakukan di Sekretariat Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) dan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS). Lokasi ini dipilih oleh peneliti dikarenakan lokasi tersebut merupakan kantor pusat dari kedua partai tersebut yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan utama mereka. Rentang waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2013.

### 3. Sumber Data

sumber data dalam penelitian kualitatif ini terbagi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara *key informan* penelitian ini. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti majalah, buku, data-data yang dimiliki partai politik dan berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian.

**Tabel II. Narasumber Penelitian DPC PDIP Kota Surakarta**

No	Narasumber	Jabatan Partai	Pekerjaan
1	Putut Gunawan	Wakil Ketua Bidang Politik&Hub. Antar Lembaga, informasi & Komunikasi	Aktivis LSM
2	Titik Sulistyorini Sri Darmastuti	Wakil Ketua Bidang Kesehatan Perempuan & Anak	Pengajar
3	Hartanti, SE	Bendahara DPC PDIP Surakarta	Anggota DPR Komisi IV
4	EH. Heny Nogogini, SH. MH.	Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPC PDIP Surakarta	Anggota DPR Komisi I
5	YF. Sukasno	Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi DPC PDIP Surakarta	Ketua DPRD Surakarta
6	M. Subhan	Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan & Keagamaan DPC PDIP Surakarta	Mubaligh

**Tabel III. Narasumber Penelitian DPD PKS Kota Surakarta**

No	Narasumber	Jabatan Partai	Pekerjaan
1	Sugeng Riyanto	Ketua DPD PKS Surakarta	Wiraswasta
2	Hartati Pamiluwati, SH	Ketua Bidang Perempuan	Pengacara
3	Saranti Donita Ritrianti	Kader Partai	Wiraswasta
4	Endang Novi Astuti Ningsih	Kepala Bidang Perempuan DPRa PKS Sumber	Pengajar
5	Romli	Ketua DPC Serengan	Wiraswasta
6	Doni Dwi Cahyadi	Sekretaris DPC PKS Banjarsari	Wiraswasta

Selain dari wawancara tersebut peneliti juga melakukan pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang dilakukan oleh DPC PDIP dan DPD PKS Surakarta berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam partai.

#### **4. Teknik Sampling**

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sampling bertujuan). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005:53). Dalam *purposive sampling*, pemilihan sampel bertitik tolak pada penilaian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif.

Sampel yang mewakili dalam penelitian ini adalah ketua dan bidang perempuan masing-masing partai. Oleh karena sampel tersebut dianggap oleh peneliti sebagai sumber informasi yang representatif terkait dengan tema dalam penelitian.

Selain itu teknik sampel dalam penelitian ini didukung oleh *snowball sampling* (sampling bola salju). *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2005:54).

Pencarian informasi dan pendapat secara mendalam dalam penelitian melalui *snowball sampling* menggunakan sebanyak empat orang calon legeslatif dari masing-masing partai. Jumlah calon legeslatif PDI Perjuangan berjumlah 45 orang dan PKS berjumlah 45 orang dalam pemilihan DPRD Surakarta tahun 2014. Sampel ini dikategorikan dalam dua kategori yaitu dua orang calon legeslatif laki-laki dan dua orang calon legeslatif perempuan.

Pemilihan teknik sampling ini dikarenakan sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Penggunaan *snowball sampling* untuk mendukung *purposive sampling* dalam penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2004:135).

*Interview* (wawancara) merupakan alat pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan gejala yang dipilih untuk diteliti. Dalam penelitian komunikasi kualitatif dikenal setidaknya ada tiga jenis wawancara: (a) wawancara percakapan informal, (b) wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, dan (c) wawancara dengan menggunakan *open-ended standard* (Pawito, 2008:132).

Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam dengan lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi pokok dari minat penelitian.

## 2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan (Sarwono, 2006:224).

Dalam penggunaannya, metode observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis metode pengamatan (Pawito, 2008:114-115), yaitu:

a. Observasi dengan ikut terlibat dalam kegiatan komunitas yang diteliti (*participant observation*). Dalam hal masih dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingkat keterlibatan, yaitu:

- Berpartisipasi secara aktif dan penuh (*total participant observation*) dimana peneliti melibatkan diri secara total dalam setiap proses dan aktivitas masyarakat yang diteliti dan bukan hanya sekedar tinggal bersama dan melakukan pengamatan.
- Berpartisipasi aktif (*active participant observation*) dimana peneliti ikut ambil bagian sampai tingkat tertentu dalam kegiatan atau proses-proses penting dalam masyarakat yang diteliti. Peneliti dalam hubungan ini tidak menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti.

b. Observasi tidak terlibat (*nonparticipant observation*)

Observasi tidak terlibat ini menjelaskan bahwa peneliti hanya datang pada kegiatan orang yang diteliti, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti lebih cenderung menggunakan jenis observasi berpartisipasi aktif dan mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan subjek penelitian dalam hal ini adalah para pengurus DPC PDIP Surakarta. Dalam penelitian ini peneliti berusaha agar membuat kondisi kegiatannya secara natural sehingga tidak mempengaruhi aktivitas subjek penelitian.



### 3. Dokumen resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal.

Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.

Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa (Moleong, 2004:219). Sumber data ini diperlukan terutama mengenai faktor-faktor yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam perekrutan partisipasi perempuan dalam calon legeslatif, kegiatan partai politik dalam menjalankan program komunikasi politik untuk menjaring kader perempuan, dan gaya kepemimpinan dalam DPC PDIP dan DPD PKS Surakarta.

### 6. Validitas/Keabsahan Data

Untuk keabsahan data maka digunakan teknik triangulasi. Secara definisi triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Intinya adalah penggunaan lebih dari satu “sumber”, dimana jika dijabarkan lebih dalam, “sumber” yang dimaksud dapat berarti banyak hal, seperti perspektif, metodologi, teknik pengumpulan data, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data (*Data Triangulation*). Triangulasi data yaitu penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data dalam kasus tunggal. Metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, FGD,

dokumentasi dan lain sebagainya. Karena sifat penelitian dinamis maka penggunaan data triangulasi sering diperlukan, sehingga hampir tidak dianjurkan dalam penelitian kualitatif hanya mengandalkan satu metode pengumpulan data (Herdiansyah, 2010:201).

Teknik Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987:331). Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2004:178).

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisis komparatif merupakan metode yang mengupayakan perbandingan mengenai gejala atau realitas sejenis yang terdapat pada suatu kasus dengan yang terdapat pada kasus lain. Analisis komparatif sangat lazim pada penelitian komunikasi kualitatif.

Dalam hubungan ini, analisis data dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing

persoalan yang di lacak dan kemudian membandingkan kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dan kasus lainnya (Pawito, 2008:108-109).

Barney G. Galaser dan Anseim L. Strauss mengemukakan tahap menganalisis dengan menggunakan teknik komparatif konstan yaitu tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, tahap memadukan kategori-kategori serta ciri-cirinya, tahap membatasi lingkup teori dan tahap menulis teori (Bungin, 2013:295-298).

Dalam tahap pertama terjadi dua kegiatan yaitu kegiatan pencatatan/pengkodeaan (*coding*) dan kegiatan memberi komentar. Penelitian ini menggunakan pengkodean berporos (*axial coding*) yang merupakan seperangkat prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru setelah pengkodean terbuka (*coding*). Ini dilakukan dengan memanfaatkan paradigma pengkodean yang mencakup kondisi, konteks, strategi aksi/interaksi, dan konsekuensi (hasil) (Strauss&Corbin, 2003:99).